BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi perekonomian di Indonesia, terutama di sektor harga barang dan jasa yang vital sedang tidak stabil, terutama jika mengalami kenaikan harga secara drastis. Dari kajian Gunawan et al (2024) sistem perekonomian di Indonesia berfluktuasi dikarenakan banyak unsur pelaku ekonomi yang terlibat antara lain pemerintah, swasta, pelaku bisnis tingkat daerah hingga nasional serta pelaku bisnis internasional. Kondisi fluktuasi kenaikan harga yang drastic akan semakin memburuk kondisi ekonomi nasional/ Hal ini salah satunya diakibatkan karena kenaikan Pajak Penjualan barang dan jasa (PPN).

Di sisi lain, secara real di awal tahun 2026 pemerintah Indonesia sedang melakukan upaya peningkatan pendapatan nasional terutama dari sektor pajak dengan prinsip ekonomi yang progresif, tanpa bergantung pada satu sektor saja. Berdasarkan informasi dari laporan Kementerian Keuangan kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2025. Efek domino dari kondisi tersebut menunjukkan perlambatan yang signifikan akibat tekanan global dan tantangan domestik. Untuk itu, dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Indonesia perlu mengatasi tantangan struktural, meningkatkan daya saing industri, serta memanfaatkan peluang di sektor-sektor strategis.

Kebijakan yang tepat dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan tersebut. Informasi dari Kompas.com (2024) menyatakan bahwa dalam masa kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia memasuki babak baru dalam perekonomian. Dengan latar

belakang tantangan global yang kompleks seperti ketidakpastian ekonomi karena geopolitik, perubahan iklim, serta perlambatan ekonomi di negara-negara maju, Prabowo membawa visi untuk menciptakan kebijakan ekonomi yang efektif, efisien, dan memiliki dampak langsung pada rakyat. Salah satu fokus utama pemerintahan ini adalah penghematan anggaran negara dan percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai langkah untuk mencapai target pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Situasi ekonomi global saat ini memang masih penuh dengan ketidakpastian serta berbagai risiko yang saling berinteraksi.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering mendengar tentang desa-desa yang mulai bangkit dari keterpurukan ekonomi. Di tengah hiruk-pikuk kota besar,terdapat desa-desa di pelosok negeri yang mulai mengelola usaha sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan warganya, antara lain melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian yang dilakukan Gunawan (2024) menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk itu. BUMDes bukan sekadar koperasi kecil, tapi entitas bisnis yang dikelola oleh desa untuk mengembangkan potensi lokal, seperti pertanian, pariwisata, atau jasa lainnya (Ardianto et al., 2025). Namun, bagaimana pengelolaan BUMDes ini bisa berkontribusi pada peningkatan pajak nasional? Pajak nasional adalah sumber utama pendapatan negara, yang digunakan untuk membangun infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Jika BUMDes berhasil, maka pendapatan desa meningkat, yang pada akhirnya bisa menambah pundi-pundi pajak dari sektor-sektor terkait.

Dunia sedang menghadapi tantangan besar pasca pandemi COVID-19. Di Indonesia, ekonomi nasional masih berjuang untuk pulih. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 mencapai sekitar 5%, tapi angka ini masih di bawah potensi sebelum pandemi. Inflasi tinggi, utang negara yang membengkak, dan ketimpangan pendapatan antar wilayah menjadi masalah serius. Di tingkat desa, banyak yang masih bergantung pada sektor pertanian yang rentan terhadap cuaca dan harga komoditas global. Suhendri (2024) menyatakan bahwa BUMDes hadir sebagai solusi, di mana desa-desa bisa mandiri dengan mengelola usaha seperti pengolahan hasil pertanian, wisata desa, atau penyewaan alat berat. Jika pengelolaan BUMDes baik, maka pendapatan desa naik, yang berarti lebih banyak uang yang bisa dipajaki oleh negara. Misalnya, pajak penghasilan dari warga desa yang bekerja di BUMDes, atau pajak pertambahan nilai dari produk yang dijual. Tapi, tantangannya adalah banyak BUMDes yang belum optimal karena kurangnya manajemen, pendanaan, atau dukungan pemerintah. Kondisi ekonomi sekarang menunjukkan bahwa desa-desa perlu diperkuat agar bisa berkontribusi lebih besar pada ekonomi nasional, termasuk melalui peningkatan penerimaan pajak.

Suyanto (2018) menemukan bahwa BUMDes yang dikelola dengan baik bisa menambah pendapatan hingga 20%, yang secara tidak langsung berkontribusi pada pajak daerah. Namun, ia juga menyoroti bahwa tanpa dukungan pemerintah, banyak BUMDes gagal. Sari et al. (2020) menemukan di mana BUMDes yang fokus pada pariwisata desa berhasil menarik wisatawan, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya menambah penerimaan pajak nasional dari sektor pariwisata. Tapi, penelitian ini juga mengungkap bahwa pengelolaan yang buruk,

seperti korupsi atau kurangnya transparansi, justru menghambat pertumbuhan. Berdasarkan kajian dari Rahman (2021) bahwa pengelolaan BUMDes yang melibatkan partisipasi masyarakat bisa meningkatkan pendapatan hingga 30%, yang berkontribusi pada pajak nasional melalui pajak penghasilan. Fenomena menariknya adalah bagaimana BUMDes membantu mengurangi migrasi ke kota, sehingga ekonomi desa lebih stabil. BUMDes yang berbasis digital, seperti e-commerce desa, berhasil meningkatkan pendapatan dan pajak dari penjualan online. Namun, tantangannya adalah akses internet yang terbatas di desa-desa terpencil. Wulandari dan Setiawan (2022). pengelolaan BUMDes yang terintegrasi dengan program pemerintah, seperti bantuan modal, bisa menambah pendapatan desa dan pajak nasional hingga 25%. Fenomena yang menonjol adalah peningkatan ketahanan pangan, yang secara tidak langsung mendukung stabilitas ekonomi nasional. (Nugroho,2023).

Dari penemuan di atas jelas bahwa pengelolaan BUMDes memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan desa, yang pada gilirannya berkontribusi pada pajak nasional. Namun, ada pola umum: BUMDes yang sukses biasanya memiliki manajemen baik, dukungan pemerintah, dan inovasi. Sebaliknya, yang gagal sering karena masalah internal seperti korupsi atau kurangnya sumber daya.

Urgensi penelitian ini sangat tinggi karena Indonesia sedang mendorong pembangunan desa sebagai bagian dari visi Indonesia Maju 2045. Dengan populasi desa yang besar, sekitar 40% dari total penduduk, BUMDes bisa menjadi mesin penggerak ekonomi lokal. Jika pengelolaan BUMDes optimal, maka pendapatan pajak nasional bisa meningkat signifikan, yang diperlukan untuk membiayai program-program nasional seperti infrastruktur, kesehatan, dan

pendidikan. Selain itu, di tengah ketimpangan ekonomi antara kota dan desa, BUMDes bisa mengurangi urbanisasi liar dan kemiskinan (Suhendri et al., 2026). Penelitian ini juga penting untuk memberikan rekomendasi kebijakan, seperti bagaimana pemerintah bisa lebih mendukung BUMDes agar tidak hanya bertahan, tapi berkembang. Tanpa penelitian seperti ini, kita mungkin kehilangan peluang untuk memanfaatkan potensi desa dalam membangun ekonomi nasional yang lebih kuat dan adil.

Dalam konteks global, negara-negara lain seperti Vietnam dan Thailand sudah sukses dengan model serupa, di mana usaha desa berkontribusi pada pajak nasional. Di Indonesia, data dari Kementerian Desa menunjukkan ada ribuan BUMDes, namun banyak yang belum maksimal dalam pengelolaan. Penelitian ini dapat mengisi gap pengetahuan, terutama tentang bagaimana pengelolaan spesifik BUMDes mempengaruhi pajak nasional secara langsung. Urgensi lainnya adalah tantangan perubahan iklim dan pandemi, yang membuat desa-desa perlu lebih mandiri. Jika BUMDes gagal, maka beban negara untuk subsidi desa akan semakin besar, yang justru menambah defisit anggaran. Oleh karena itu, penelitian ini bukan hanya sekedar bernuansa akademis, namun juga praktis untuk masukan bagi pengambil kebijakan khususnya ekonomi nasional melalui BUMDes.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh pengelolaan keuangan BUMDES terhadap peningkatan pajak nasional?
2. Sejauh mana tantangan dan hambatan BUMDes dalam pengelolaan BUMDes untuk peningkatan ekonomi?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan BUMDES terhadap kenaikan pajak.
2. Sejauh mana tantangan dan hambatan BUMDes dalam pengelolaan BUMDes untuk peningkatan ekonomi?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi BUMDES

   Penelitian ini akan memberikan rekomendasi kepada BUMDes dalam peningkatan pengelolaan keuangan terutama yang berdampak pada kenaikan pajak sesuai dengan aturan pemerintah. Di samping itu dapat memberi rekomendasi langkah strategis BUMDes dalam mengelola lembaga tersebut sebagai upaya peningkatan ekonomi desa.

2. Peneliti selanjutnya

   Penelitian ini akan memberikan masukan kepada peneliti selanjutnya dengan topik yang sama. Lebih spesifik lagi, peneliti selanjutnya dapat memperluas wilayah lokasi penelitian bukan hanya di beberapa provinsi, sehingga hasilnya dapat maksimal untuk memotret perkembangan kenaikan pajak nasional dari BUMDes se Indonesia.